



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2021**

PURWODADI, 2021

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 ini dapat terselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Di samping itu, penyusunan LKjIP ini juga sebagai bentuk kepatuhan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi pokok LKjIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 ini memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pencapaian Kinerja Pemerintah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan selama tahun 2021, sekaligus menginformasikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan upaya solusi penyelesaiannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat mendukung terwujudnya visi misi Bupati Grobogan serta kebijakan dan program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Grobogan 2016-2021.

Namun demikian, dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP dimasa mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan mampu menunjukkan kinerjanya secara lebih nyata sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini dan semoga dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan secara lebih sinergis.

Purwodadi, 31 Januari 2022

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan



PAEMA SAPUTRA, S.Sos, MM
NIP. 197204091992031002

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai visi dan misi Bupati Grobogan sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparan dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean goverment* dan *good governance*, maka disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKjIP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati Grobogan tersebut.

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2021, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada dalam LKjIP tersebut diharapkan segenap stakeholders Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan dapat berperan aktif dan bekerja sama guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan pada Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan di tahun-tahun selanjutnya.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 dapat dikatakan baik. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan 2021 dan Penetapan Kinerja (PK) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021.

Hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam RKT dan PK Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 menunjukkan bahwa:

1. **Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategis** dari 21 (dua puluh satu) sub kegiatan adalah 91,68 %.
2. **Capaian indikator kinerja utama** yaitu prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standar kompetensi jabatan, realisasinya **78,66 %**. Target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis adalah **95 %**. Dengan demikian capaian untuk indikator ini adalah **82,80 %** dan termasuk dalam kategori **tinggi**. Sedangkan indikator kedua yaitu prosentase penurunan jumlah pelanggaran kasus disiplin ASN realisasinya **33,33 %**. Target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis adalah **35 %**. Dengan demikian capaian untuk indikator ini adalah **95,23 %** dan termasuk dalam kategori **sangat tinggi**.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
I Gambaran Umum Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1
A Kelembagaan Organisasi	1
B Uraian Organisasi	2
II Fungsi Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	3
III Permasalahan Umum Organisasi	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
I Perencanaan Kinerja	5
A Visi dan Misi	5
B Tujuan dan Sasaran	7
II Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021	10
I Capaian Kinerja Organisasi	10
II Realisasi Anggaran	18
BAB IV PENUTUP	22
I Tinjauan Umum Capaian Kinerja	22
II Strategi / Program Kerja Untuk Peningkatan Kinerja Masa Mendatang	23
Lampiran-Lampiran	24

BAB I

PENDAHULUAN

I. GAMBARAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

A. Kelembagaan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Sedangkan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Kepala
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Umum.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, membawahi :
 - a. Sub Bidang Formasi, Pengadaan dan Pendataan.
 - b. Sub Bidang Jabatan Struktural dan Fungsional.
4. Bidang Mutasi Pegawai, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian.

- b. Sub Bidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian.
- 5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural.
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.
- 6. Bidang Pembinaan Pegawai, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pembinaan Kedisiplinan.
 - b. Sub Bidang Pembinaan Kesejahteraan dan Penilaian Kinerja.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

B. Uraian Organisasi

Susunan organisasi sebagaimana tersebut di atas, jumlah karyawan yang ada, baik pejabat maupun staf adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang, dengan perincian sebagai berikut:

- 1. Pegawai berdasarkan kualitas pendidikan :
 - a. Pasca Sarjana : 8 orang
 - b. D IV / Sarjana : 24 orang
 - c. Sarmud (D1 -DIII) : 8 orang
 - d. SLTA : 8 orang
- 2. Pegawai berdasarkan golongan :
 - a. Golongan IV : 6 orang
 - b. Golongan III : 32 orang
 - c. Golongan II : 10 orang
- 3. Pegawai berdasarkan jabatan :
 - a. Eselon II : 1 orang
 - b. Esselon III : 5 orang
 - c. Esselon IV : 11 orang
 - d. Staf : 31 orang

II. FUNGSI STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan, tugas pokok dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang meliputi perencanaan dan pengembangan Pegawai ASN, mutasi Pegawai ASN, pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN serta pembinaan Pegawai ASN di Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan tugas pokok di atas, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. pengelolaan kesekretariatan Badan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. PERMASALAHAN UMUM ORGANISASI

Kewenangan pemerintah daerah di bidang kepegawaian yaitu melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kepegawaian sesuai kebijakan yang sudah ditetapkan. Pembinaan teknis dan administratif dalam rangka meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Pemasalahan umum (*strategic issued*) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Belum optimalnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan,
2. Masih terjadinya pelanggaran disiplin aparatur pemerintah, dan
3. Masih kurangnya ketersediaan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing perangkat daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

I. Perencanaan Kinerja

A. Visi dan Misi

Sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, serta dalam rangka memacu motivasi kerja dan memperjelas arah peningkatan kinerja organisasi, visi (gambaran/kondisi yang ingin dicapai di masa depan) yang ditetapkan oleh Bupati / Wakil Bupati Grobogan adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh”.

Penjelasan dari Visi Bupati / Wakil Bupati Grobogan adalah sebagai berikut;

1. Masyarakat yang sejahtera secara utuh, mengandung maksud bahwa tercipta kondisi masyarakat di Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil.
2. Masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, mengandung maksud bahwa kondisi masyarakat Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah kabupaten.

Selanjutnya untuk memperjelas tahapan pencapaiannya, visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi. Untuk kurun waktu Tahun Anggaran 2016-2021 misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman dan sumberdaya air;
2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan;
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata;
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat , keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya;
5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik;
7. Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang;
8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat;
9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian dan diklat serta melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan diklat yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pengembangan, kepangkatan, penggajian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, diklat pegawai, pembinaan kedisiplinan dan kesejahteraan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan manajemen kepegawaian di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan tugas pokok di atas Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah mendukung pencapaian misi ke-6 (enam) yaitu ***meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik.***

B. Tujuan dan Sasaran.

1. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi Bupati / Wakil Bupati Grobogan yang telah ditetapkan serta analisis terhadap lingkungan, tujuan yang akan dicapai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan adalah ***Meningkatkan Kompetensi dan Kedisiplinan ASN.***

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh perangkat daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan adalah ***Meningkatnya Kompetensi dan Kedisiplinan ASN.***

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan diperlihatkan pada Tabel berikut :

Tabel 2.1 Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran BKPPD Kabupaten Grobogan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 6 : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kompetensi dan kedisiplinan ASN	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	1. Prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standart kompetensi jabatan 2. Prosentase penurunan jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN

3. Target Kinerja

Adapun Target Kinerja yang akan dicapai tercantum pada Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2 Target Kinerja BKPPD Kabupaten Grobogan

No.	Indikator Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standart kompetensi jabatan	80	80	82	85	90	95
2	Prosentase penurunan jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN	10	15	20	25	30	35

II. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, serta gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Kabupaten Grobogan dengan Bupati Grobogan Tahun 2021, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2021 telah melaksanakan 3 (tiga) program yang terjabar dalam 10 (sepuluh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 8.463.232.000,00 (*Delapan milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

I. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pada tahun 2021, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 dan Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, penilaian capaian kinerja diukur dengan :

1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021

Target dan realisasi capaian sasaran strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 diperlihatkan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Sasaran BKPPD Kabupaten Grobogan Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Ket.
1	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	Prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standart kompetensi jabatan	95	78,66	
		Prosentase penurunan jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN	35	33,33	

Indikator prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standart kompetensi jabatan di sini adalah : untuk pejabat struktural apabila telah memenuhi persyaratan pendidikan, kepangkatan dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Sedangkan kompetensi jabatan untuk pejabat fungsional apabila telah memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. Indikator prosentase penurunan jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN adalah jenis pelanggaran disiplin sesuai dengan peraturan perundangan tentang disiplin ASN.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2021 diperlihatkan pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian*)	
					Nilai	Kriteria
1	Meningkatnya kompetensi dan kedisiplinan ASN	Prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standart kompetensi jabatan	95	78,66	82,80	Tinggi
		Prosentase penurunan jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN	35	33,33	95,23	Sangat Tinggi

*)Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017

3. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dibandingkan dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian kinerja organisasi tahun ini jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Sasaran	2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standart kompetensi jabatan	82,00	84,46	85,00	87,07	90,00	81,34	95	78,66
2	Prosentase penurunan jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN	20,00	24,00	25,00	36,84	30,00	50,00	35	33,33

Berdasarkan Tabel 3.4 terdapat kenaikan capaian kinerja yaitu : untuk indikator prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standart kompetensi jabatan mengalami penurunan sebesar 3,29 % dari 81,34 % pada tahun 2020 menjadi 78,66 % pada tahun 2021. Sedangkan untuk indikator prosentase penurunan jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 33,34 % dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2021 prosentase penurunan jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN sebesar 33,33 % sedangkan tahun 2020 sebesar 50 %.

4. Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dibandingkan Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Tabel 3.5 memperlihatkan realisasi kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sampai dengan Tahun 2021.

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja s.d. tahun 2021

Indikator Utama	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standart kompetensi jabatan	%	82.00	84.46	103.00	85.00	87.07	102.43	90.00	81.34	90.38	95.00	78.66	82.80
Prosentase penurunan jumlah pelanggaran kasus disiplin pegawai	%	20.00	24.00	120.00	25.00	36.84	147.37	30.00	50.00	166.67	35.00	33.33	95.23

Dari tabel 3.5 di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan jika dibandingkan dengan target jangka menengah sesuai dokumen perencanaan strategis rata-rata setiap tahunnya dapat tercapai dengan kategori tinggi sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

a. Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja.

Keberhasilan capaian kinerja dikarenakan adanya kerjasama dari semua pihak dan upaya-upaya peningkatan kompetensi ASN dengan melaksanakan diklat secara berkelanjutan. Di samping itu adanya sosialisasi dan pembinaan ASN tentang kedisiplinan ASN dapat menekan angka pelanggaran disiplin ASN setiap tahunnya. Monitoring dan evaluasi yang rutin setiap periodenya juga menjadi salah satu faktor yang dapat menekan angka pelanggaran disiplin ASN.

Terjadinya penurunan capaian pada tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada indikator Prosentase Pejabat Struktural dan Fungsional yang Memenuhi Standart Kompetensi Jabatan, lebih dikarenakan karena faktor promosi jabatan baik dari Jabatan Pelaksana ke Jabatan Pengawas maupun Jabatan Pengawas ke Jabatan Administrator. Sehingga Pejabat yang menduduki posisi jabatan yang baru belum mengikuti Diklat Pim yang menjadi tolak ukur standart kompetensi jabatan. Sedangkan pada indikator Prosentase penurunan jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN, dikarenakan meningkatnya jumlah jenis kasus pelanggaran disiplin.

b. Alternatif solusi yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja dilakukan antara lain dengan melakukan koordinasi dengan BPSDM Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat mengirimkan pejabat-pejabat Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mengikuti diklat PIM di BPSDM Provinsi Jawa Tengah. Serta kerjasama dengan BKN Regional I Yogyakarta dan BKD Provinsi Jawa Tengah dalam

rangka pembinaan kepegawaian terutama tentang kedisiplinan ASN.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya, terutama anggaran, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, sehingga di beberapa kegiatan, anggaran yang tersedia tidak terserap maksimal tetapi output yang dihasilkan dapat maksimal sesuai target, sebagaimana terlihat dalam tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2.460.544.000	2.400.594.449	2,44	Terbayarnya gaji dan tunjangan untuk ASN	Bulan	12	12
2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23.925.000	22.790.000	4,74	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas kantor	Buah	55	55
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	14.553.000	2,98	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	item	11	11
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	340.088.000	328.571.400	3.39	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	34	34
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.797.000	70.594.000	0,29	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	Bulan	12	12
6	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	59.000.000	54.279.030	8,00	Tersedianya barang cetak dan penggandaan dokumen	Bulan	12	12
7	Penyediaan Bahan Material	82.500.000	78.923.300	4,34	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	12
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	595.670.000	595.586.691	0,01	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Bulan	12	12
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	6.782.000	15,23	Terlaksananya administrasi surat keluar masuk dan	Surat	4.000	4.000

No.	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
					pembelian perangkat dan benda pos lainnya			
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.000.000	145.539.072	17,77	Tersedianya anggaran kebutuhan pembayaran rekeninglistrik , air dan jasa telekomunikasi	Bulan	12	12
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.057.000	61.472.300	2,51	Tersedianya Bahan Pembersih dan alat kebersihan serta tersedianya tenaga kebersihan, keamanan dan transportasi kantor	Bulan	12	12
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.730.000	46.597.158	0,28	Teralaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor	Unit	4	4
13	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.080.000	19.950.000	0,65	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Unit	1	1
14	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.995.000	19.901.000	0,47	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Bulan	12	12
15	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.249.805.000	870.670.000	30,34	Terlaksananya seleksi penerimaan calonASN	Pelamar	7.500	8.846
16	Pengelolaan Data Kepegawaian	60.625.000	59.510.000	1,84	Tervalidasinya data dan informasi ASN	Person	100 %	100 %
17	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	87.172.000	85.568.000	1,84	Terlaksananya pengelolaan kenaikan pangkat dan pembinaan administrasi penilaian angka kredit	OPD	49	49
18	Pengelolaan Promosi ASN	133.220.000	103.586.000	22,24	Terlaksananya pembinaan	Jabatan	500	500

No.	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
					dan pengembangan jabatan struktural dan fungsional			
19	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	49.500.000	38.600.000	22,02	Terlaksananya ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat	orang	130	65
20	Pembinaan Disiplin ASN	54.694.000	51.788.000	5,31	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan kedisiplinan pegawai	orang	174	174
21	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	2.845.830.000	2.683.005.200	5,72	Terlaksananya Diklat Kepemimpinan dan terlaksananya Latihan Dasar (Latsar) CPNS	orang	503	503
	JUMLAH	8.463.232.000	7.758.860.600	8,32				

Secara keseluruhan sumber daya anggaran yang tersedia adalah Rp 8.463.232.000,- dengan realisasi penggunaan sebesar Rp 7.758.860.600,- atau sebesar 91,68 % yang berarti ada efisiensi anggaran sebesar 8,32 %.

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian Pernyataan Kinerja di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan didukung oleh 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan. Program-program dan indikator program yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7 Program-Program yang Dilaksanakan BKPPD Kabupaten Grobogan Tahun 2021

No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	%	100	100
2	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan layanan kepegawaian	%	100	100
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi bagi setiap PNS paling sedikit 20 JP /tahun	%	80	57,33

II. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 dan Revisi Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, dalam pelaksanaan sasaran strategis dan indikator sasaran diwujudkan dengan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan, pada tahun anggaran 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 8.463.232.000,00 (*delapan milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) yang penggunaannya dijabarkan dalam Tabel 3.9 di bawah ini

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Koordinator Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
				KEUANGAN	%	Fisik (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH		8,463,232,000	7,758,860,600	91.68	100.00	704,371,400
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		8,463,232,000	7,758,860,600	91.68	100.00	704,371,400
	KEPEGAWAIAN		5,617,402,000	5,075,855,400	90.36	100.00	541,546,600
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,982,386,000	3,866,133,400	97.08	100.00	116,252,600
A.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,460,544,000	2,400,594,449	97.56	100.00	59,949,551
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2,460,544,000	2,400,594,449	97.56	100.00	59,949,551
A.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		23,925,000	22,790,000	95.26	100.00	1,135,000
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Drs. PARJAN, MM	23,925,000	22,790,000	95.26	100.00	1,135,000
A.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,163,055,000	1,142,507,421	98.23	100.00	20,547,579
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Drs. PARJAN, MM	15,000,000	14,553,000	97.02	100.00	447,000
4	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	Drs. PARJAN, MM	340,088,000	328,571,400	96.61	100.00	11,516,600
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Drs. PARJAN, MM	70,797,000	70,594,000	99.71	100.00	203,000
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Drs. PARJAN, MM	59,000,000	54,279,030	92.00	100.00	4,720,970
7	Penyediaan Bahan/Material	Drs. PARJAN, MM	82,500,000	78,923,300	95.66	100.00	3,576,700
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Drs. PARJAN, MM	595,670,000	595,586,691	99.99	100.00	83,309
A.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		248,057,000	213,793,372	86.19	100.00	34,263,628
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Drs. PARJAN, MM	8,000,000	6,782,000	84.78	100.00	1,218,000
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Drs. PARJAN, MM	177,000,000	145,539,072	82.23	100.00	31,460,928
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Drs. PARJAN, MM	63,057,000	61,472,300	97.49	100.00	1,584,700
A.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		86,805,000	86,448,158	99.59	100.00	356,842
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Drs. PARJAN, MM	46,730,000	46,597,158	99.72	100.00	132,842
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Drs. PARJAN, MM	20,080,000	19,950,000	99.35	100.00	130,000
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Drs. PARJAN, MM	19,995,000	19,901,000	99.53	100.00	94,000

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Koordinator Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
				KEUANGAN	%	Fisik (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
B.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		1,310,430,000	930,180,000	70.98	100.00	380,250,000
15	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	TRI AGUNG BUDI S, S.Kom.MM.	1,249,805,000	870,670,000	69.66	100.00	379,135,000
16	Pengelolaan Data Kepegawaian	TRI AGUNG BUDI S, S.Kom.MM	60,625,000	59,510,000	98.16	100.00	1,115,000
B.2	Mutasi dan Promosi ASN		220,392,000	189,154,000	85.83	100.00	31,238,000
17	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	CATUR SUHANTORO, SH	87,172,000	85,568,000	98.16	100.00	1,604,000
18	Pengelolaan Promosi ASN	TRI AGUNG BUDI S, S.Kom,MM	133,220,000	103,586,000	77.76	100.00	29,634,000
B.3	Pengembangan Kompetensi ASN		49,500,000	38,600,000	77.98	100.00	10,900,000
19	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	ZAINUDDIN FANANI, S. Hut. MT	49,500,000	38,600,000	77.98	100.00	10,900,000
B.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		54,694,000	51,788,000	94.69	100.00	2,906,000
20	Pembinaan Disiplin ASN	LAMJAN, S. Sos. M. Si	54,694,000	51,788,000	94.69	100.00	2,906,000
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		2,845,830,000	2,683,005,200	94.28	100.00	162,824,800
C	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		2,845,830,000	2,683,005,200	94.28	100.00	162,824,800
C.1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		2,845,830,000	2,683,005,200	94.28	100.00	162,824,800
21	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	ZAINUDDIN FANANI, S. Hut, MT	2,845,830,000	2,683,005,200	94.28	100.00	162,824,800
	JUMLAH		8,463,232,000	7,758,860,600	91.68	100.00	704,371,400

Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2021, yang secara ringkas komposisi penggunaan dan realisasinya sebagaimana tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10 Penyerapan Anggaran Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
1	Belanja Operasi	8.125.028.000,-	7.430.289.200,-	91,47 %
2	Belanja Modal	338.204.000,-	328.571.400,-	96,61 %
Jumlah		8.463.232.000,-	7.758.860.600,-	91,68 %

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2021, apabila dibandingkan Tahun 2020 maka terjadi penurunan sebesar 3,81 %, sebagaimana tabel 3.12 berikut ini :

Tabel 3.12 Penyerapan Anggaran Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021

No	T.A.	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
1	2016	6.480.000.000,-	5.513.608.605,-	85,09 %
2	2017	7.693.500.000,-	6.626.271.811,-	86,13 %
3	2018	6.599.927.000,-	6.230.669.551,-	94,41 %
4	2019	10.110.842.500,-	8.912.911.492,-	88,15 %
5	2020	4.245.695.800,-	4.046.567.073,-	95,31 %
6	2021	8.463.232.000,-	7.758.860.600,-	91,68 %

Pada tahun anggaran 2021 terjadi penurunan prosentase penyerapan anggaran dibandingkan tahun 2020, tetapi dari jumlah anggaran mengalami kenaikan sebesar 99,34 %.

BAB IV

P E N U T U P

I. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan sebagai Perangkat Daerah teknis mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian dan diklat serta melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan diklat yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pengembangan, kepangkatan, penggajian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, diklat pegawai, pembinaan kedisiplinan dan kesejahteraan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan manajemen kepegawaian di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya aparatur, sumber dana anggaran dan sarana prasarana secara efektif dan efisien mungkin .

Memperhatikan uraian dan data capaian kinerja tahun 2021, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator sasaran yaitu prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standar kompetensi jabatan, realisasinya **78,66 %**. Target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis adalah 95 %. Dengan demikian capaian untuk indikator ini adalah **82,80 %** dan termasuk dalam kategori **tinggi**. Sedangkan indikator kedua yaitu prosentase penurunan jumlah pelanggaran kasus disiplin ASN realisasinya **33,33 %**. Target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis adalah 35 %. Dengan demikian capaian untuk indikator ini adalah **95,23 %** dan termasuk dalam kategori **sangat tinggi**.

II. Strategi / Program Untuk Peningkatan Kinerja Masa Mendatang

Strategi / Program yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan di masa mendatang antara lain :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Kepegawaian Daerah
- 3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 untuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan /evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Purwodadi, 31 Januari 2022

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan





LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perhitungan Indikator Kinerja Utama

1) Prosentase pejabat struktural dan fungsional yang memenuhi standart kompetensi jabatan

Formulasi / Rumus Perhitungan :

Jumlah pejabat struktural yang memenuhi standar kompetensi jabatan dibagi dengan jumlah seluruh pejabat struktural yang ada dikalikan 100 % ditambah jumlah pejabat fungsional yang memenuhi standar kompetensi dibagi dengan jumlah seluruh pejabat fungsional yang ada dikalikan 100%, kemudian dibagi dua.

Data Jumlah Pejabat Struktural Pemerintah Kabupaten Grobogan per Desember 2021

NO.	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JUMLAH JABATAN	DIKLATPIM / DIKLAT KOMPETENSI JABATAN	
			SUDAH	BELUM
1	Pejabat Eselon II	35	17	18
2	Pejabat Eselon III	161	121	40
3	Pejabat Eselon IV	622	331	291
	Jumlah	818	469	349
4	Pejabat Fungsional (Guru, Kesehatan dan Lainnya)	3782	3782	-

2) Prosentase penurunan jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN

Formulasi / Rumus Perhitungan :

Jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN tahun n-1 dikurangi jumlah kasus pelanggaran disiplin tahun n dibagi jumlah kasus pelanggaran disiplin tahun n-1 dikalikan 100 %.

$$\frac{(n-1) - n}{n-1} \times 100 \%$$

Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Tahun 2019 sejumlah 12 kasus

Tahun 2020 sejumlah 6 kasus

Tahun 2021 sejumlah 4 jenis kasus